

**Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS
(Financial Management Information System)
Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)**

Sri Rahmayanti¹, Syaumudinsyah², Nia Kurniati³, Nurwahidah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email: sriahmayanti86@gmail.com, syaumudinsyah46@yahoo.com,

niaalqiya@gmail.com, anadokumentasi165@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan, serta melakukan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Pariwisata Lombok Barat sudah diimplementasikan dengan baik dilihat dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi. Komunikasi sudah berjalan dengan baik, terlihat dari tidak terdapatnya pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah. Indikator sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat 3 faktor dalam sumber daya ini yaitu sumber daya manusia yang memang handal, pegawai dibekali dengan sosialisasi dan pelatihan rutin, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Disposisi atau sikap, para implementor memiliki sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS, karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA FMIS lebih efektif. Indikator struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan Aplikasi SIMDA FMIS dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA FMIS.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, SIMDA FMIS, Kualitas, Laporan Keuangan*

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

Abstract

Regional autonomy gives governments the freedom to regulate and manage their own regional households, establish policies, and carry out their own financial accountability. Regional governments are required to prepare financial reports to be accountable for their regional financial management. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SIMDA FMIS application to improve the quality of financial reports at the West Lombok Regency Tourism Office. This type of research is descriptive-qualitative research. The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used Miles and Huberman's qualitative method, which consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the SIMDA FMIS application to improve the quality of financial reports at the West Lombok Tourism Office has been well implemented in terms of four indicators : namely communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. Communication has been going well, as seen by the absence of conflict between policy implementers and orders. The resource indicator is well implemented; there are three factors in this resource: namely human resources that are indeed reliable, employees being provided with regular socialization and training, and the availability of adequate facilities and infrastructure. Disposition or attitude: the implementers have a good attitude or response to the policy of implementing the SIMDA FMIS application, because they are aware that the application of SIMDA FMIS is more effective. Indicators of bureaucratic structure, especially in relation to supervision of the application of the SIMDA FMIS application, can be seen from the presentation of financial reports, which have never been hampered by SIMDA FMIS.

Keywords: *Implementation, Policy, SIMDA FMIS, Financial Statements*

Pendahuluan

Semenjak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi

dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dalam Undang-Undang (Sri Rahayu, 2018).

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, serta melakukan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Sesuai dengan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan (Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, n.d.). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam mewujudkan terciptanya *good governance* dan *clean governance*, Pemerintah Daerah memerlukan suatu sistem yang dapat diandalkan, dimana sistem tersebut mampu mengolah data untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai rujukan pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah, informasi keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, n.d.).

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang kemudian aplikasi ini dinamakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Kebijakan penerapan SIMDA sudah efektif dijalankan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putu Ayu Puji Laksmi Dewi,dkk (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan penerapan SIMDA pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Mataram telah berhasil dan para pegawai merasa senang dengan adanya program tersebut. Kesesuaian hasil yang dihasilkan dengan menggunakan SIMDA memenuhi kriteria laporan keuangan yang efektif yaitu dapat dipercaya, ketepatan, tepat waktu, dan bentuk-bentuk laporan (Dewi, Putu Ayu Puji Laksmi; Animah; Mariadi, 2021).

Penerapan aplikasi SIMDA juga belum bisa secara maksimal untuk mewujudkan terciptanya *good governance* dan *clean governance*, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahmatia Azindani,dkk (2020) yang menyatakan bahwa implementasi SIMDA tidak berpengaruh terhadap *good government governance*, namun berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan lainnya adalah *good government governance* bukan merupakan mediator hubungan antara implementasi SIMDA dan kualitas laporan keuangan, namun merupakan mediator hubungan antara kinerja aparatur pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan (Azzindani, Rahmatia; Irwan, 2020).

Pengembangan penerapan SIMDA selanjutnya adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah *Financial Management Information System* (SIMDA FMIS). Aplikasi SIMDA FMIS dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Penerapan SIMDA FMIS didasarkan pada Permendagri 64/2013 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang kemudian oleh Kabupaten Lombok Barat mewajibkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menggunakan aplikasi dimaksud untuk memudahkan pengelolaan keuangan.

Dinas Pariwisata Lombok Barat merupakan salah satu SKPD Kabupaten Lombok Barat yang mengimplementasikan FMIS sejak tahun 2022, dimana untuk tahun sebelumnya menggunakan SIMDA. Tujuan dari penerapan SIMDA FMIS ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA FMIS yaitu penginputan atau pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sangat bergantung dengan jaringan internet dan errornya sistem yang terkadang muncul karena banyaknya instansi yang mengakses aplikasi SIMDA FMIS, serta apabila terjadi kesalahan penginputan pada aplikasi tersebut, maka untuk memperbaiki data harus melakukan koordinasi dengan verifikator pusat yaitu BPKAD Kabupaten Lombok Barat Bidang Akutansi, dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan harus menyertakan dengan bukti memo kesalahan penginputan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekkan, melaksanakan, melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Solichin Abdul, 2011) menyatakan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislative yang penting keputusan badan peradilan.”

Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori impelemntasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu (Roring, Andreas Delpiero; Mantiri, Michael S.; Lapijan, 2021):

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi atau sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

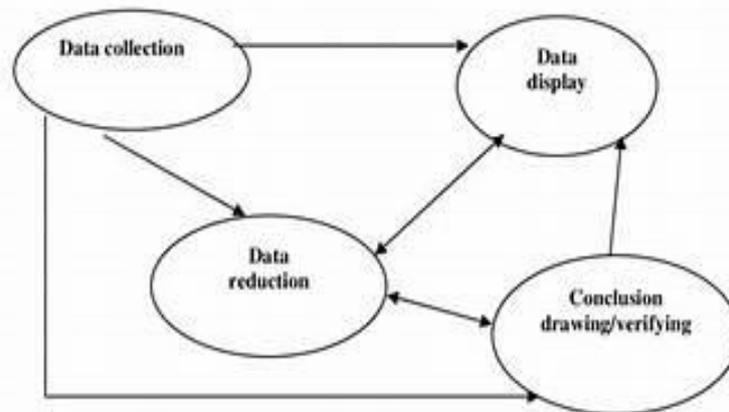
Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2014a). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu (Suyanto, 2005). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumen tertulis. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden melalui interaksi tatap muka (Picco, 2023). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada informan kunci (*key informan*) yaitu penanggungjawab SIMDA FMIS bagian penatausahaan, penanggungjawab SIMDA FMIS bagian anggaran, penanggungjawab SIMDA FMIS bagian akuntansi dan pelaporan.

Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dokumentasi/dokumen tertulis merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2014b). Teknik analisis data Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun model analisis data Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)



Gambar 1. Model Analisis Miles dan Huberman

Hasil dan Pembahasan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, BPKP telah membuat sistem aplikasi berbasis komputer, yakni Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA). SIMDA ini dapat mempermudah pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan keuangan daerah. Ciri utama aplikasi SIMDA adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah.

SIMDA FMIS merupakan pengembangan dari aplikasi SIMDA yang sudah berjalan sejak tahun 2013. SIMDA FMIS merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi SIMDA FMIS juga mengintergrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjournalannya secara otomatis, sehingga setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat langsung dilihat jurnal atau transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan. Untuk menganalisis implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Pariwisata Lombok Barat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri dari 4

(empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sesungguhnya penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan.

Secara umum, pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian Aplikasi SIMDA FMIS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat telah mengerti atau paham tentang makna dan tujuan dari penerapan Aplikasi SIMDA FMIS. Program aplikasi SIMDA FMIS merupakan suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegritas. Pegawai Dinas Pariwisata khususnya operator SIMDA FMIS sudah memahami setiap data input dan input apa saja yang akan diolah atau diproses pengolahannya sehingga menghasilkan output.

Pada bagian perencanaan atau penganggaran hanya dengan menginput data anggaran kegiatan yang telah disepakati pada aplikasi SIMDA FMIS, sehingga menghasilkan output RKA dan DPA. Untuk bagian keuangan, proses pengelolaan keuangan dengan aplikasi ini harus mempersiapkan dokumen keuangan seperti SPJ atau transaksi keuangan yang akan dicairkan kemudian melakukan penginputan pada aplikasi tersebut untuk menghasilkan output yaitu SPP-SPM. Untuk pelaporan, semua transaksi keuangan yang telah diinput pada aplikasi diolah secara otomatis dan menghasilkan output laporan yang diperlukan seperti Buku Kas Umum (BKU), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Buku Pajak, dan laporan keuangan lainnya.

Proses transmisi (penyaluran) komunikasi implementasi kebijakan aplikasi SIMDA FMIS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok berjalan dengan baik, itu dapat dilihat dari tidak terdapatnya pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dan rantai informasi yang tidak terlalu panjang, sehingga tidak terjadi pembiasan informasi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Keahlian dari para pelaksana penerapan kebijakan menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, olehnya jika jumlah pegawai pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan atau keterampilan para pelaksana untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia tentang Aplikasi SIMDA FMIS. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada pegawai yang bertanggungjawab atau berwenang terhadap aplikasi tersebut. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai pegawai yang mencukupi, ahli dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan laporan keuangan tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan baik dan didukung oleh beberapa faktor dalam hal sumberdaya, yaitu :

- a. Sumber daya manusia yang memang handal atau memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
- b. Untuk penerapan aplikasi SIMDA FMIS, pegawai dibekali dengan sosialisasi dan pelatihan rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya.
- c. Sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan aplikasi SIMDA FMIS.

3. Disposisi atau Sikap

Sikap implementor mempengaruhi penerapan kebijakan. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang

hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah. Para implementor pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memiliki sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS, karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA FMIS lebih efektif, sehingga mereka setuju untuk menerapkannya. Pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian Aplikasi SIMDA FMIS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat merasa sangat terbantu dari penerapan Aplikasi SIMDA FMIS. Proses pengelolaan keuangan dengan aplikasi ini hanya harus mempersiapkan dokumen keuangan seperti SPJ yang akan dicairkan kemudian melakukan penginputan pada aplikasi untuk membuat data SPP-SPM. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah pengambilan keputusan.

Aplikasi SIMDA FMIS ini dapat mempermudah pegawai dalam menyusun laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah tercapai. Pegawai yang bertanggungjawab dengan kaporan keuangan hanya menginput data-data transaksi ke dalam menu-menu aplikasi yang telah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan atau menginput transaksi sesuai dengan tanggal transaksi kemudian diolah secara otomatis oleh sistem aplikasi dan menghasilkan output berupa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)*

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

dan fragmentasi (Edward : 1980). SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk meyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan

Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat terdapat operator SIMDA FMIS yang bertugas mengawasi jalannya penerapan Aplikasi SIMDA FMIS. Pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan Aplikasi SIMDA FMIS dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA FMIS. Dengan adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi, contohnya pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan Aplikasi SIMDA FMIS.

Simpulan

Implementasi aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Pariwisata Lombok Barat sudah diimplementasikan dengan baik dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi. Komunikasi sudah berjalan dengan baik, itu dapat dilihat dari tidak terdapatnya pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dan rantai informasi yang tidak terlalu panjang, sehingga tidak terjadi pembiasan informasi. Sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat 3 (tiga) faktor dalam sumber daya ini yaitu sumber daya manusia yang memang handal atau memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, pegawai dibekali dengan sosialisasi dan pelatihan rutin,

seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan aplikasi SIMDA FMIS. Disposisi atau sikap para implementor pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat memiliki sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS, karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA FMIS lebih efektif. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses pelaksanaan penerapan Aplikasi SIMDA FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat terdapat operator SIMDA FMIS yang bertugas mengawasi jalannya penerapan Aplikasi SIMDA FMIS.

Pengaruh struktur birokrasi khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan atas penerapan Aplikasi SIMDA FMIS dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA FMIS. Dengan adanya pengawasan yang baik dan perhatian khusus oleh tim administrator bentuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi, contohnya pengadaan server cadangan. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur birokrasi khususnya dalam hal pengawasan juga memegang peranan penting dalam mendukung penerapan Aplikasi SIMDA FMIS.

Daftar Pustaka

- Azzindani, Rahmatia; Irwan, M. (2020). Pengaruh Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54.
- Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan. (n.d.). *Program Aplikasi Komputer SIMDA SIMDA Versi 2.1*.
<https://www.bpkp.go.id/index.php?/Konten/433/SIMDA.Bpkp>.
- Dewi, Putu Ayu Puji Laksmi; Animah; Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72–86.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang

Sri Rahmayanti, Syaumudinsyah, Nia Kurniati, Nurwahidah

Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010.

Picco, M. (2023). *Metode Wawancara: Pengertian, Jenis Metode dan Contohnya*. ruangjurnal.com/metode-wawancara/

Roring, Andreas Delpiero; Mantiri, Michael S.; Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasan Selatan. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 1-11.

Solichin Abdul, W. (2011). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Sri Rahayu, A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.

Sugiyono. (2014a). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2014b). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suyanto, B. S. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. Kencana.